

**EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA
PERIHAL TERJADINYA KREDIT MACET
PADA KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM)
DI BANK DANAMON INDONESIA CABANG PEMALANG**

**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Pasca Sarjana (S-2)**

**Program Studi
Magister kenotariatan**



Disusun Oleh :
SAKTI HARLAMBANG, SH.
B 4 B 0 0 5 2 1 5

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2007**

**EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA
PERIHAL TERJADINYA KREDIT MACET
PADA KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM)
DI BANK DANAMON INDONESIA CABANG PEMALANG**

TESIS

Disusun Oleh :

SAKTI HARLAMBAH, SH.

B 4 B 0 0 5 2 1 5

**Telah Disetujui
Oleh :**

Tanggal, JULI 2007

Pembimbing Utama,

Ketua Program,

H.R. SUHARTO, SH, MHum.
NIP : 131 631 844

MULYADI, SH, MS.
NIP : 130 529 429

P E R N Y A T A A N

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan daftar pustaka.

S e m a r a n g, J U L I 2007

Yang menerangkan,

SAKTI HARLAMBANG, SH.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT, dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul : **“EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA PERIHAL TERJADINYA KREDIT MACET PADA KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) DI BANK DANAMON INDONESIA CABANG PEMALANG”**.

Termotivasi oleh keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum perikatan, hukum jaminan dan sekaligus hukum perbankan mengenai eksekusi di bawah tangan jaminan fidusia di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang, maka penulis mencoba untuk mengkaji lebih mendalam secara yuridis dalam suatu karya ilmiah ini.

Penulisan Tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis percaya bahwa Tesis ini dalam penyusunannya masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Bapak H.R. SUHARTO, SH, MHum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini ;
3. Seluruh Staf Pengajar / bapak – ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan tulus ikhlas menularkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi perkuliahannya dengan baik ;
4. Seluruh Staf Karyawan / Staf Adminidtrasi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu selama penulis mengikuti studi perkuliahan ;
5. Tim Penguji Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian dan juga bersedia menguji Tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan ;
6. Seluruh keluarga penulis, dengan seluruh pengorbanan serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik ;
7. Seluruh rekan kuliah Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang akhir pekan (*week-end*) angkatan 2005 dari penulis, and *especially the great thanks to* Erfin Febriansyah, SH., Feri Santosa, SH, MKn., Hilal Fitri, SH., Bambang Setiawan, SH, MKn., Adi Hendro, SH., Agus Purnomo,

SH, MKn., atas persatuannya serta persaudaraannya yang telah diberikan secara tulus dan tanpa pamrih.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan keseluruhan. (*God Bless You All*).

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan kontribusi kepada dunia keilmuan *civitas akademika* ilmu hukum dan Magister Kenotarian. Dan apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan semata-mata dikarenakan kekhilafan penulis. Oleh karena itu kepada seluruh pembaca diharapkan dapat memberikan saran berikut kritik yang bersifat membangun, sehingga nantinya Tesis ini berada dalam formatnya yang terbaik.

S E M A R A N G, J U L I 2 0 0 7

P E N U L I S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Manfaat Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian	7
2. Asas-Asas Perjanjian	9
3. Syarat Sah Perjanjian	13
4. . Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	15

B. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit	18
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	18
2. Pengertian Kredit Kepemilikan Mobil (KPM)	26
3. Bentuk Perjanjian Kredit	27
C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Bank	32
1. Tinjauan Tantang Jaminan dalam Pemberian Kredit	32
2. Pengertian Jaminan Fidusia	36
3. Subyek Jaminan Fidusia	38
4. Obyek Jaminan Fidusia	39
5. Sertifikat Jaminan Fidusia	41
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	42
D. Kredit Bermasalah	46
1. Penyelamatan Kredit	47
2. Penyelesaian Kredit Macet	50

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	52
B. Jenis Penelitian	52
C. Analisa Data	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Tahap Pemberian Pinjaman Kredit Pemilikan Mobil (KPM) di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemasang	58

2. Alasan Penggunaan Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia Perihal Terjadinya Kredit Macet Pada Kredit Kepemilikan Mobil Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang	66
3. Pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia Pada Kredit Pemilikan Mobil (KPM) Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang	67
4. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan Terhadap Jaminan Fidusia pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) Yang Macet di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang	77
B. Pembahasan	
1. Alasan Penggunaan Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia Perihal Terjadinya Kredit Macet pada Kredit Kepemilikan Mobil di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang	80
2. Pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia pada Kredit Pemilikan Mobil (KPM) Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang	83
3. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan Terhadap Jaminan Fidusia di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA PERIHAL TERJADINYA KREDIT MACET PADA KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) DI BANK DANAMON INDONESIA CABANG PEMALANG

Kebutuhan akan pinjaman kredit oleh masyarakat dewasa ini sangatlah besar. Dari kebutuhan masyarakat yang memiliki sifat produktif maupun kebutuhan yang bersifat konsumtif belaka telah dibiayai oleh pinjaman kredit. Bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman kredit. Pinjaman kredit telah menjadi suatu komoditas bank yang sarat dengan keuntungan. Namun tidak sedikit pula komoditas bank tersebut menjadi pil pahit kerugian yang harus ditelan oleh bank. Problematika kredit macet adalah salah satu contoh dan pasti terjadi serta tidak dapat untuk dihindari. Eksistensi barang jaminan adalah mutlak diperlukan untuk mengurangi risiko wanprestasi sehingga terjadi kredit macet oleh si peminjam kredit tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang memiliki tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia perihal terjadinya kredit macet pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) dan solusi hukum terhadap hambatan-hambatan yang telah dialami oleh pihak bank. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metodologi Yuridis Empiris, yaitu dengan melihat praktik pada pelaksanaan eksekusi tersebut. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara serta data sekunder yang berupa kajian undang-undang dan studi pustaka. Dan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah berupa mekanisme pelaksanaan eksekusi di bawah tangan jaminan fidusia perihal terjadinya Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) yang macet di Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang. Pelaksanaan eksekusi tersebut telah dijamin oleh Negara dengan adanya Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada dataran praktik eksekusi di bawah tangan ini dilakukan sarat dengan pertimbangan-pertimbang yang di keluar dari pintu musyawarah mufakat antara pihak bank dengan pihak nasabah peminjam kredit tersebut. Namun tidak sedikit pula hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak bank dalam upayanya menyelesaikan kredit dengan eksekusi di bawah tangan. Hambatan-hambatan yang bersifat klasik dan sering datang dari pihak nasabah peminjam kredit yang macet adalah sepenuhnya dapat ditangani oleh bank dengan didukung oleh penandatanganan dokumen-dokumen sebelum kredit tersebut diberikan, sehingga pihak bank memiliki kekuatan hukum dalam bertindak dan melaksanakan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia tersebut.

Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

FIDUCIARY EXECUTION CONCERNING NON-REPAID CREDIT IN AUTOMOBILE OWNERSHIP CREDITS IN PEMALANG BRANCH OF BANK DANAMON INDONESIA

The public demand for credit has been very high nowadays. People's needs, ranging from the productive ends to the more consumptive-oriented ones are increasingly dependent on credit-derived money. Banks as a financial service institution play a strategic role in keeping up with public needs for loan. Credit services prove to be very profitable for them. However, it's not a rare case that this intended commodity of credit services often backfires and causes the most severe financial loss for the related banks. The problem of credit risk is one of the inevitable consequences of this practice. The existence of a guarantee is absolutely essential in lessening the risk of loss when the non-repayment occurs.

The research was conducted in Pemalang Branch of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. It aimed at finding out the execution process of fiduciary deals concerning non-repaid credits in Automobile Ownership Credits and the legal solutions for difficulties faced by the bank. This research used Juridical-Empirical methodology, which is by looking at real-practices of the execution process. The data used by the study is primary ones obtained from the source by way of interview as well as secondary ones through studying related laws and literature. The data were then analysed qualitatively and concluded deductively.

The results show the mechanism of fiduciary deals execution of the non-repaid Automobile Ownership Credit in Pemalang Branch of Bank Danamon Indonesia. The execution itself is guaranteed by the State in Chapter V of Fiduciary Execution, Article 29 point (1) of the Law no. 42 1999 concerning Fiduciary Deals. In practice, fiduciary deals are really a result of deep considerations by methods of conventions involving the bank and the debtor. The subsequent difficulties then arise, usually as a result of the debtor's non-repayment. Banks will then take care of this by looking for signed documents prior to the issue of the loan, so that they will have the legitimate power to act and execute fiduciary deals.

Keywords: Execution, Fiduciary Deals

BAB I

PENDAHULUAN

C. Latar Belakang

Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga yang menjembatani kebutuhan dana dari unit masyarakat yang kelebihan (*surplus unit*) kepada unit masyarakat yang kekurangan (*deficit unit*). Fungsi ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Aturan ini memberikan pengertian bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. (seperti tertuang dalam UU No.10 tahun 1998, Pasal 1 ayat (2)).

Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana, maka pemberian kredit merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan pendapatan bagi bank. Hal ini disebabkan karena pemberian kredit merupakan salah satu alternatif investasi bank yang memberikan kontribusi *profit* cukup besar dengan risiko yang relatif lebih kecil karena adanya lembaga jaminan yang disyaratkan dalam setiap pemberian kredit, baik berupa jaminan benda-benda tetap ataupun benda-benda bergerak.

Instrumen perlindungan hukum bagi bank dalam menjamin pengembalian kredit telah cukup tersedia, diantaranya Hak Tanggungan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotik atas tanah dan *Credietverband*. Selain itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai dan Jaminan Fidusia.

Bentuk jaminan fidusia saat ini mulai digunakan secara luas dalam transaksi kredit perbankan karena prosesnya cukup sederhana, mudah dan cepat, walaupun sesungguhnya masih belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Selain itu, daya tarik pranata fidusia terletak pada dimungkinkannya pemberi fidusia tetap menguasai benda yang dijaminkan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan tetap menggunakan jaminan fidusia tersebut.

Penggunaan pranata jaminan fidusia tidak terlepas dari persaingan antar bank dalam menyalurkan kreditnya, khususnya Kredit Kepemilikan Mobil (KPM). Produk KPM ini merupakan salah satu produk Kredit Perbankan Swasta maupun Nasional di sektor pembiayaan *consumer loan* (pinjaman konsumtif) yang cukup ketat persaingannya. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap bank menyalurkan fasilitas KPM.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, kesulitan yang banyak dihadapi oleh dunia perbankan adalah dalam hal eksekusi karena tidak adanya kejelasan aturan hukum, sehingga banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi jaminan fidusia adalah dengan melalui prosedur gugatan biasa yang panjang, mahal dan berbelit-belit. Namun setelah berlakunya undang-undang ini proses eksekusi jaminan fidusia menjadi relatif lebih mudah dengan adanya beberapa pilihan bagi bank dalam

pelaksanaan eksekusi. Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), oleh Penerima Fidusia,
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan,
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam memberikan kredit kepemilikan mobil, pihak debitur tidak perlu memberikan jaminan benda miliknya kepada bank. Maksudnya adalah dengan dibelinya mobil oleh debitur dengan fasilitas kredit dari bank, maka untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit dari bank, pihak debitur hanya menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada bank. Jadi hanya dokumen kepemilikan dari mobil tersebut yang diserahkan kepada pihak bank, namun mobil tersebut tetap dapat digunakan oleh debitur.

Dengan dasar kepercayaan atas itikad baik dari debitur untuk mengembalikan dana atau fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian mobil tersebut, maka Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), tidak diserahkan kepada debitur sampai dengan dilakukannya pelunasan oleh debitur kepada bank, sehingga dengan dilunasinya fasilitas kredit bank

tersebut oleh debitur, maka debitur akan menjadi pemilik sepenuhnya atas mobil tersebut.

Dalam eksekusi kredit macet pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), terdapat beberapa pilihan bagi kreditur atau bank, namun sebagian besar eksekusi tersebut dilakukan oleh Bank Danamon Cabang Pemalang dengan menggunakan eksekusi dibawah tangan.¹

Bank Danamon yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur dalam melakukan eksekusi di bawah tangan ini tetap memperhatikan prosedur pokok yang tertuang dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, yakni dengan dilakukannya pengumuman oleh pihak Penerima Fidusia (bank) dan atau pihak Pemberi Fidusia (debitur) kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan, sehingga hal ini berdampak pada kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan eksekusi di bawah tangan oleh bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang Eksekusi Dibawah Tangan Perihal Terjadinya Kredit Macet Pada Kredit Kepemilikan Mobil Di Bank Danamon Cabang Pemalang, beserta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi dibawah tangan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka beberapa pokok permasalahan yang menjadi kajian adalah :

¹ Sumber Pra-Riset Tanggal 10-Maret-2007 di PT.Bank Danamon Indonesia,Tbk Cabang Pemalang.

1. Mengapa Bank Danamon Cabang Pemalang sebagai kreditur dalam pemberian Kredit Pemilikan Mobil (KPM) cenderung memilih menggunakan eksekusi dibawah tangan terhadap objek jaminan fidusia sebagai langkah penyelesaian terhadap Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang macet?
2. Bagaimana pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan terhadap Jaminan Fidusia sebagai upaya dalam melindungi Kepentingan Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang?
3. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Bank Danamon Cabang Pemalang dalam eksekusi dibawah tangan terhadap objek jaminan fidusia serta solusi hukumnya guna mengatasi hambatan tersebut?

A. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan diuraikan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya, yakni dalam pengikatan kredit secara fidusia.
2. Menjadi *input* atau masukan bagi para *bankers* dan para debitur dalam menangani masalah-masalah yang timbul pada perjanjian pengikatan kredit dengan pemberian fasilitas Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) secara lembaga fidusia.

A. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan yuridis pihak Bank Danamon Cabang Pemalang sebagai kreditur dalam pemberian fasilitas Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) lebih memilih menggunakan eksekusi di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia sebagai langkah penyelesaian terhadap kredit pemilikan mobil yang macet.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan terhadap Jaminan Fidusia sebagai upaya untuk melindungi kepentingan Bank Danamon Cabang Pemalang selama proses eksekusi berjalan.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Bank Danamon Cabang Pemalang dalam pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan terhadap objek Jaminan Fidusia serta menentukan solusi hukum guna mengatasi hambatan tersebut selama proses eksekusi di bawah tangan berjalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Maksudnya ketidak lengkapan tersebut dikarenakan rumusan pasal tersebut hanya meliputi perjanjian sepihak saja, dimana di satu pihak ada kewajiban dan di pihak lain ada hak, tetapi tidak meliputi perjanjian timbal balik dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk timbulnya hak dan kewajiban balik kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari R.Setiawan², bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan pemaknaan perjanjian diasumsikan terlalu luas, hal ini diungkapkan oleh Mariam Darus Badruzaman³, dimana dalam pendapatnya bahwa perjanjian dianggap terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawain yang diatur dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, sedangkan pengertian perjanjian yang dimaksud dalam Buku III ini adalah hanya terbatas perihal

² R.Setiawan ; *Pokok-pokok Hukum Perikatan* ; Bumi Cipta, Bandung, 1997, hlm.49.

³ Mariam Darus Badruzaman ; *Perjanjian Kredit Bank* ; Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm.89.

perjanjian di dalam lapangan harta kekayaan antara dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Pendapat hukum Profesor Sudikno Mertokusumo⁴, memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut Subekti⁵, pengertian perjanjian adalah bahwa suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbul suatu hubungan hukum antara dua orang yang dikenal dalam istilah perikatan, yang dalam bentuk perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Berdasarkan rumusan-rumusan perjanjian para pakar hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para pakar tersebut belum mempunyai keseragaman dalam memberikan definisi dari kata “perjanjian” itu sendiri, apakah sebagai perbuatan hukum, hubungan hukum ataukah sebagai peristiwa hukum dalam melaksanakan suatu hal untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Kesepakatan merupakan unsur mutlak atau penting dalam suatu perjanjian, kesepakatan inilah yang menimbulkan hubungan hukum bagi kedua belah pihak.

2. Asas-Asas Perjanjian

⁴ Sudikno Mertokusumo ; *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* ; Edisi Keempat, Liberty Yogyakarta, 1997, hlm.1

⁵ Subekti ; *Hukum Perjanjian* ; PT.Internusa, Cetakan XIII, Jakarta, 1991, hlm.1.

Suatu sistem hukum mengandung asas-asas hukum, adapun asas-asas hukum menurut Sudiko Mertokusumo⁶, yaitu : “Pikiran dasar yang umum sifatnya dan merupakan latar belakang dari peraturan yang kongret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan kongret tersebut.”

Dengan demikian, asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang dalam peraturan yang kongret akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya, karena sifat dari asas hukum adalah abstrak dan umum.

Beberapa asas hukum yang melandasi diadakannya suatu perjanjian yang telah sering kita jumpai diberlakukan masyarakat, antara lain:

- a) Asas kebebasan berkontrak Asas konsensualisme
- b) Asas kekuatan mengikat
- c) Asas itikad baik

Berikut ini akan diuraikan mengenai asas-asas dalam perjanjian tersebut :

a) Asas kebebasan berkontrak.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang luas kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian dengan subjek hukum mengenai apa saja sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga para pihak dalam melaksanakan perjanjian dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri

⁶ *Opcit*, hlm.34.

yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian, dan diperbolehkan untuk mengatur sendiri segala sesuatu mengenai perjanjian yang diadakan. Sifat perjanjian ini disebabkan karena perjanjian menganut sistem terbuka yang merupakan asas kebebasan membuat perjanjian, lazimnya dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sebagai berikut : “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Ketentuan ini berisikan penegasan bahwa semua subjek hukum, baik orang maupun badan hukum dapat bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang klausul-klausul dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b) Asas konsensualisme.

Perkataan konsensualisme berasal dari bahasa latin Consensus yang berarti sepakat, maka sesuai dengan artinya bahwa konsensualisme adalah kesepakatan. Suatu perjanjian terjadi atau mulai ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁷ Jadi dalam perjanjian sudah ada dan mempunyai akibat hukum apabila telah ada kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam suatu perjanjian.

c) Asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*).

⁷ A.Qirom Syamsudin M ; *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya* ; Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.19.

Asas ini dikenal sebagai asas berlakunya perjanjian, maksudnya yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang, jadi para pihak harus menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati suatu undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Disamping itu, pada Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara berbunyi : ”Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Maksud dari kedua ayat tersebut adalah untuk menghindari penyimpangan yang berupaya membatalkan perjanjian secara sepihak dari pelaksanaan setelah disepakati oleh para pihak, tetapi jika diadakan suatu pembatalan perjanjian, maka harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak demi menjamin kepastian hukum. Pelanggaran suatu perjanjian dari salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan wanprestasi atau melanggar isi perjanjian. Apabila para pihak tidak melakukan suatu perjanjian tersebut, akan mempunyai akibat hukum yang sama dengan para pihak tersebut tidak melaksanakan undang-undang. Oleh karena itu akibat hukum dari *asas pacta sunt servanda* itu adalah bahwa pihak ketiga atau bahkan hakim sekalipun dilarang mencampuri isi dari

perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, tujuannya adalah demi kepastian hukum.

d) Asas itikad baik.

Pada saat melaksanakan perjanjian harus diingat ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa : “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”

Menurut ahli hukum Bayu Seto⁸, definisi itikad baik memuat elemen-elemen :

- 1) Kejujuran, dalam pembentukan dan pelaksanaan kewajiban ;
- 2) Kepatutan, adalah kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri ;
- 3) Tidak sewenang-wenang, dalam arti bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat untuk memanfaatkan kedudukannya itu untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar (*unreasonable advantage*) dari pihak lain, yang memiliki posisi tawar yang lemah.

Lebih lanjut *esensi* dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata Berkaitan dengan pasal ini, maka R.Subekti⁹, mengemukakan : “Kalau itikad baik pada pembuatan perjanjian adalah kejujuran, maka itikad

⁸ Bayu Seto ; *Beberapa Hal Tentang Itikad Baik Dan Tanggung Jawab* ; Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

⁹ *Opcit*, Hal.48.

baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan yaitu penilaian baik terhadap tindak tanduk para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.”

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa isi dari perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pada saat melaksanakan perjanjian harus berdasarkan kepatutan dan keadilan. Kepatutan dalam arti bahwa kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melaksanakan perjanjian disadari sebagai tindakan yang baik, sedangkan arti keadilan adalah bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di dalam hukum¹⁰. Sehingga pada akhirnya tidak ada pihak yang dirugikan pada saat perjanjian dilaksanakan.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun 4 (empat) syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang *esensial* dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kesepakatan tidak ada artinya apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan, maka berarti para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu

¹⁰ Sudikno Mertokusumo ; *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* ; Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.37.

tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.

Selanjutnya ketentuan mengenai cacat kehendak diluar ketentuan perundang-undangan, diatur dalam yurisprudensi yaitu mengenai penyalahgunaan keadaan. Hal ini belum diatur dalam perundang-undangan, hanya diatur dalam yurisprudensi. Apabila hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka banyak ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu seluruhnya atau sebagian.¹¹

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan ini, Subekti¹² menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengampuan (*curatele*) dan orang sakit jiwa.
- c) Suatu sebab tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah obyek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan, jadi tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian bisnis yang fiktif.
- d) Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat

¹¹ Henry P.Panggabean ; *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian* ; Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.15.

¹² Subekti ; *Hukum Perjanjian* ; PT.Internusa, Cetakan XIII, Jakarta, 1991.

memaksa, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Tanpa sebab atau *causa* diartikan bahwa tujuan yang hendak dicapai para pihak tidak dapat terlaksana. Misalnya orang mengadakan pembaharuan atau perubahan perjanjian kredit, tetapi perjanjian kredit yang lama atau yang akan digantikan tersebut adalah tidak ada, maka perjanjian tersebut adalah tanpa sebab dan karenanya batal demi hukum¹³

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orang atau subyek-subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat-syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁴

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Apabila seseorang tidak dapat melakukan apa yang dijanjikan, karena kesalahannya sedangkan ia sudah diperingatkan untuk hal itu maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia berbuat “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji” atau ia juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹⁵

C.Asser¹⁶, mengemukakan bahwa seseorang yang tidak memenuhi dalam penunaian perikatannya, karena ia tidak memenuhi kewajibannya, tidak memenuhi pada waktunya atau tidak semestinya, hal ini dianggap telah melakukan cidera janji.

¹³ J. Satrio ; *Hukum Jaminan – Hak-hak Jaminan Kebendaan* ; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.77.

¹⁴ Subekti ; *Hukum Perjanjian* ; PT.Intermasa, Cetakan XIII, Jakarta 1991, hlm.1.

¹⁵ *Ibid*, hlm.45.

¹⁶ C.Asser ; *Pedoman untuk Pengkajian Hukum Perdata* ; Jilid III Hukum Perikatan, bagian I/Perikatan Terjemahan oleh Sulaiman Binol, Dian Rakyat Jakarta, 1991, hlm.251.

Lebih lanjut Subekti¹⁷, mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa 4 macam :

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;

- a. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jadi seseorang dikatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi prestasinya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai kepada tahap wanprestasi, diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, bahwa : *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah ia mulai diwajibkan apabila debitur setelah perikatan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”*

Jadi maksud “berada dalam keadaan lalai” adalah peringatan atau pernyataan tentang saat selambat-lambatnya seseorang wajib memenuhi prestasi.¹⁸ Dalam Pasal 1238 KUHPdata diatur cara pemberitahuan itu dilakukan, yakni bahwa : *“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkannya, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

¹⁷ *Opcit*, hlm.45.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman ; *Kompilasi Hukum Perikatan* ; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.19.

Bentuk-bentuk pernyataan lalai diantaranya surat perintah (*bevel*) atau *exploit* juru sita, akta sejenis (*soortgelijke acte*) atau ketentuan mengenai kondisi apa yang menyebabkan keadaan lalai yang disepakati dalam perjanjian.

Jika terjadi ingkar janji (*wanprestasi*), maka pihak yang berpiutang (*kreditur*) dapat menuntut pihak yang berhutang (*debitur*) yang lalai antara lain sebagai berikut :

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun pelaksanaan tersebut sudah terlambat (*nakomen*) ;
- b. Dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian, tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (*scade vorgeeding*) ;
- c. Dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai terlambatnya pelaksanaan perjanjian ;
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya diadakan pemutusan perjanjian disertai dengan permintaan penggantian kerugian (*ontbinding*).¹⁹

B. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin dapat terjadi.

¹⁹ *Ibid*, hlm.21.

Dalam dunia perdagangan, kepercayaan tidak dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang, barang ataupun jasa. Sedangkan dalam dunia perbankan, kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang dan jasa. Pihak yang menerima kredit (debitur) adalah biasanya berbentuk subyek hukum yakni individu / perseorangan maupun badan hukum seperti Perseoran Terbatas dan juga badan usaha seperti Firma ataupun *Comanditere Venotschap* (CV).

Istilah yang biasanya digunakan dalam dunia perbankan untuk pemberi dana disebut dengan kreditur, sedangkan pihak yang menerima dana kredit disebut debitur. Kreditur mempercayai debitur dalam proses pemberian kredit, dalam hal ini berbentuk uang ataupun jasa. Kreditur memberikan kredit kepada debitur dengan harapan debitur dapat menggunakan uang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan usaha. Dengan demikian kredit merupakan wujud pemberian prestasi oleh pihak kreditur kepada debitur dan wujud dari kontraprestasinya berupa pengembalian kredit disertai bunga oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.

Berikut beberapa definisi tentang kredit baik berdasarkan hukum positif maupun pendapat dari pakar hukum. Definisi kredit berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan, bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian menurut Hale²⁰ adalah suatu prestasi yang diserahkan pada saat sekarang dengan harapan pada masa yang akan datang akan menerima kontraprestasi.

Pendapat dari Gatot Supramono²¹, bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam hal perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.

Salah satu faktor terpenting dalam pemberian kredit adalah kepercayaan, sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik.

Menurut R.H Hale²², jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, *banker's* tersebut membutuhkan penilaian kredit dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan risiko yang ada atau yang mungkin terlibat dari pinjaman yang diberikan. Analisis tersebut sangat penting untuk dapat digunakan sebagai :

- a) Menentukan berbagai risiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan hukum suatu usaha.

²⁰ R.H Hale ; *Credit Analysis A Complete Guide* ; Jhon Wiley and Sons, Inc , 1983, hlm.52. (terjemahan bebas penulis)

²¹ Gatot Supramono ; *Perbankan dan Masalah Kredit* ; Cetakan II, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm.52.

²² Ibid, hlm.54. (terjemahan bebas penulis)

- b) Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan pelunasan melalui analisis cashflow usaha debitur.
- c) Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur, sehingga bank dapat melakukan penyesuaian dengan struktur dan yang dipersiapkan untuk digunakan.
- d) Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya, baik dari sumber pelunasan primer maupun sekunder.

Kepercayaan bank terhadap calon nasabah pada umumnya didasarkan atas keyakinan bank tentang pemenuhan “5-C prinsip perkreditan”, yaitu :

1) Character.

Adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dan keadaan keluarga. Oleh karena itu petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya.

2) Capacity.

Merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan *resources* yang terkait dengan bidang usaha, kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen. Disamping itu juga kemampuan mengantisipasi variabel dari *cashflow* usaha, sehingga *cashflow* tersebut dapat menjadi sumber pelunasan kredit yang utama pembayarannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan bersama.

3) *Capital*.

Penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari aktiva lancar (*current assets*) yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan kewajiban lancar (*curent liabilities*) disebut modal kerja (*working capital*) dan modal yang tertanam pada aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain. Analisis capital ini dimaksudkan untuk menggambarkan struktur modal (*capital struktur*) debitur, sehingga bank dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain (*kreditur atau supplier*). Bank harus mengetahui *debt to equity ratio*, yaitu besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan.

4) *Collateral*.

Jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini dapat berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang

berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut undang-undang yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga.

5) *Conditions.*

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam maupun luar negeri, dan usaha tersebut masih mempunyai prospek ke depan selama kredit masih dinikmati oleh debitur. Termasuk juga analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula.

Disamping konsep “5C” tersebut diatas, Henderson dan Maness²³ juga menambahkan apa yang disebut dengan kriteria “5 Principles (5P)”, sebagai berikut :

1) *Purpose.*

Ini merupakan penilaian terhadap maksud permohonan kredit dari calon debitur agar penggunaan jumlah atau jenis kredit tersebut terarah, aman dan produktif serta membawa manfaat bagi pengusaha, masyarakat, bank dan otoritas moneter.

2) *People.*

²³ Henderson, J.W. and Mannes, T.S. ; *The Financial Analysis Desk Book : A Cash Flow Approach To Liquidity*; Van Nostrand Reinhold, 1989, New York, hlm.79. (terjemahan bebas penulis)

Penilaian yang harus dilakukan terhadap calon debitur antara lain mitra usahanya, orang / lembaga yang *memback-up* debitur, *customer* dan *suppliers* yang sangat penting dalam menunjang kegiatan usaha calon debitur.

3) *Protection.*

Bilamana usaha debitur mengalami kegagalan, bank sudah harus terlindungi dengan baik dari kesulitan penyelesaian kreditnya, dan bank harus mempunyai alternatif penyelesaian dengan agunan yang dikuasai dan pengikatan yuridis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) *Payment.*

Penilaian juga harus dilakukan terhadap sumber-sumber pelunasan primer dan sekunder, sehingga peta pelunasan (*roadmap repayment*) dan kemungkinan penyelesaian kredit dapat dilaksanakan tanpa kesulitan. Ini berkaitan dengan *cashflow* perusahaan dan variabel yang mempengaruhinya, sehingga akan lebih jelas bagaimana posisi *cash in* dan *cash out*, yang menggambarkan apakah perusahaan mengalami likuiditas usaha atau tidak.

5) *Perspective.*

Posisi usaha debitur pada waktu yang akan datang mampu mengikuti kondisi ekonomi, keuangan dan fiskal. Ini berarti merupakan proyeksi perbandingan risiko dan *cashflow* perusahaan.

Selanjutnya penilaian dengan kriteria 3 R, meliputi :

- a) *Return*, yaitu hasil usaha yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut ;

- b) *Repayment*, yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit ;
- c) *Risk Bearing Ability*, yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Istilah perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam UU Perbankan maupun KUHPerdara, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. Beberapa pakar hukum berpendapat perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara, yang berbunyi: “*Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*”

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini terdapat persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak debitur suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama kepada pihak yang memberikan pinjaman / kreditur.

Menurut R.H. Hale²⁴, terjadinya perjanjian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

²⁴ *Opcit*, hlm.53. (terjemahan bebas penulis)

- a) Terdapat kedua belah pihak serta ada persetujuan pinjam-meminjam antar kreditur dengan debitur.
- b) Mempunyai jangka waktu tertentu.
- c) Hak kreditur untuk menuntut dan memperoleh pembayaran serta kewajiban debitur untuk membayar prestasi yang diterima.

Pengertian perjanjian kredit sebagian mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara dan sebagian lainnya tunduk pada peraturan dalam Perubahan Undang-undang Perbankan (UU No.10 Tahun 1998). Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri. Dengan mengacu pada undang-undang perbankan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit sebagian masih bisa berdasarkan pada ketentuan KUHPerdara Bab XIII Buku III.

2. Pengertian Kredit Kepemilikan Mobil (KPM)

Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai batasan dan unsur-unsur yang bersifat umum untuk kredit, atau dengan kata lain definisi tersebut tidak memfokuskan pada pengertian Kredit Pemilikan Mobil (KPM). Oleh karena tesis ini akan membahas mengenai pemberian Kredit Pemilikan Mobil (KPM) sebagai salah satu produk dari bank yaitu jenis kredit konsumtif.

Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) merupakan salah satu dari tiga produk *assets* yang terpenting dalam *Bisnis Consumer Banking*, disamping dua lainnya yaitu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Serba Guna (KSG). Adapun definisi dari Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) adalah pembiayaan kendaraan secara *retail* dengan sistem langsung kepada

nasabah yang tujuannya untuk dipergunakan secara pribadi yang mana dibeli dari *dealer* kendaraan, maupun dari *showroom* dan lain-lain, dengan menggunakan iklan sebagai sarana menarik nasabah langsung berhubungan dengan pihak bank dan menggunakan sistem komisi *referral* pada *sales* di *dealer* agar menggiring nasabah untuk menggunakan produk tersebut.²⁵ Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) termasuk penggolongan kredit konsumtif, yaitu yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Adapun sumber dana untuk angsuran kredit dan pembayaran bunganya berasal dari pendapatan tetap maupun keuntungan yang diterima oleh debitur perorangan tersebut setiap bulannya, sehingga kredit jenis ini banyak diberikan oleh perbankan kepada para pegawai maupun pengusaha yang berpenghasilan tetap dan dari keuntungan usaha yang bersangkutan.

Walaupun pada awalnya kredit tersebut bersifat konsumtif, namun melalui *multiplier effect* dengan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) maka secara tidak langsung kredit tersebut akan bersifat produktif yaitu meningkatkan produksi barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur.

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan undang-undang lainnya juga tidak melarang seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya, kecuali untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk yang sudah

²⁵ Sumber Pra-Riset Tanggal 10-Maret-2007 di PT.Bank Danamon Indonesia,Tbk Cabang Pemalang.

ditentukan. Bentuk tertentu ini tidaklah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi juga merupakan syarat untuk sahnya perjanjian tersebut. Misalnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat akta notaris oleh Pejabat Notaris, sedangkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan harus dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Perjanjian dengan bentuk formalitas tertentu semacam ini disebut dengan perjanjian formal (*Formal Agreement*).

Dengan demikian sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendakinya, yaitu apakah perjanjian tersebut akan dibuat secara lisan ataupun tertulis.

Perjanjian tertulis dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPdata ditentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik dan tulisan di bawah tangan. Berdasarkan pasal tersebut ini dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) macam akta dalam lingkup perjanjian yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPdata, adalah : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Sedangkan rumusan akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara, yakni : *“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda-tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”*

Menurut Sudiko Mertokusumo²⁶ : Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat diantara para pihak yang berkepentingan.

Dalam perjanjian kredit perbankan, harus dilaksanakan secara tertulis yang berdasarkan pada ketentuan :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 15 / IN / 10 / 66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1996 Juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2 / 649 / UPK / Pemb, tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presiden Kabinet Nomor 10 / EK / 2 / 1967, tanggal 6 Februari 1967 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk apapun tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan nasabah atau bank-bank sentral dengan bank-bank lainnya.
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 2 / 162 / KEP / DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27 / 7 / UPPB tertanggal 31 Maret 1993 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan

²⁶ *Opcit*, Hal:115.

bahwa : setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati permohonan kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Lazimnya suatu perjanjian kredit terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak diantara kedua belah pihak yang memiliki kedudukan yang sama kuat atau seimbang. Kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang dianggap perlu bagi terjadinya perjanjian itu melalui negosiasi diantara mereka. Di sini unsur kesamaan kedudukan dan unsur keadilan suatu perjanjian terlihat secara jelas.

Didalam bisnis tertentu terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku (*standar*), yaitu berupa perjanjian (kontrak) yang sebelumnya oleh pihak tertentu (perusahaan) telah ditentukan secara sepihak sebagian isinya dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang dengan berbagai pihak (konsumen perusahaan) tersebut.²⁷

Perjanjian kredit antara pihak bank (*kreditur*) dengan pihak debitur dalam perkembangannya tumbuh menjadi perjanjian *standar*. Perjanjian ini umumnya dilaksanakan jika pihak lawannya tidak mempunyai kedudukan yang seimbang (ekonomi lemah), baik secara posisi maupun dikarenakan ketidaktahuannya, lalu hanya dapat menerima apa yang diberikannya itu. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau memintanya perubahan. Substansi yang belum dibakukan hanyalah

²⁷ Sanusi Bintang dan Dahlan ; *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* ; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.18.

beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, waktu, tempat dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang dipinjamkan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausula-klausulanya.

Perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Perjanjian tersebut tidak didahului oleh proses negosiasi, dimana idealnya para pihak memiliki kedudukannya yang sama kuat, melainkan perjanjian itu hanya terjadi dengan cara kreditur telah menyiapkan syarat-syarat baku atau standar pada formulir perjanjian yang sudah dicetak. Klausula-klausula tersebut hanya diberikan oleh pihak kreditur untuk disetujui oleh debitur. Perjanjian inilah yang biasa disebut dengan perjanjian standar.

Hondinus dan Fortuijn (dalam Badruzaman)²⁸, merumuskan definisi perjanjian *standar* sebagai berikut : Perjanjian *standar* adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Memperhatikan pendapat para sarjana tentang asas kebebasan berkontrak dalam kaitan dengan perjanjian kredit sebagaimana diuraikan, maka asas kebebasan berkontrak itu tidak bersifat mutlak.

Kesimpulan tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

²⁸ Mariam Darus Badruzaman ; *Perjanjian Kredit Bank* ; Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm.47-48.

- a) Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.
- b) Perjanjian (baku) kredit ditetapkan secara sepihak oleh bank, tanpa dapat dapat dirundingkan lagi.
- c) Calon debitur hanya dapat memilih salah satu diantara dua pilihan, yakni menerima atau menolak isi perjanjian baku tersebut.

Dari uraian-uraian diatas, bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dibidang perbankan dalam kaitan dengan perjanjian kredit yang bersifat *standard* atau baku, sebagian besar terabaikan. Hal ini disebabkan calon debitur tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi pihak kreditur, karena perjanjian baku itu mencerminkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bentuk, isi dan syarat-syarat dalam perjanjian baku ditentukan secara sepihak, yakni oleh bank sebagai kreditur.
- b) Calon debitur tidak mengetahui isi dan klausula-klausula yang dimuat dalam perjanjian baku. Kalaupun tahu, belum tentu dia memahami risiko-risiko yang mungkin timbul dan merugikan dirinya.
- c) Salah satu pihak secara ekonomi lebih kuat.
- d) Terdapat unsur “terpaksa” dalam menerima isi perjanjian kredit tersebut.

Dengan terabaikannya sebagian hak calon debitur dalam menghadapi perjanjian baku, maka satu-satunya asas kebebasan berkontrak yang “masih dimiliki” olehnya adalah kebebasan memilih satu

diantara dua pilihan, yakni “menerima” atau “menolak” perjanjian kredit itu.

C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Bank

1. Tinjauan Tantang Jaminan dalam Pemberian Kredit

Dalam rangka meyalurkan kredit, maka pihak bank akan mensyaratkan adanya jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya, sebagaimana dengan penjelasan dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya wanprestasi dari debitur, sehingga jaminan kredit dapat berfungsi sebagai sumber dana untuk melunasi kredit pokok dan tunggakan bunganya.

Pengertian jaminan kredit adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit. Oleh sebab itu perjanjian pengikatan jaminannya bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang keberadaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur yang bersangkutan.

Peranan jaminan dalam suatu pemberian kredit adalah untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dengan tidak dibayarnya kembali kredit yang telah diberikan.

Jenis-jenis jaminan dikenal ada dua macam jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan jaminan dimana semua krediturnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap

kreditur-kreditur lainnya. Pelunasan hutangnya dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan hutang debitur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Namun dalam praktik, jaminan umum ini jarang dipakai, berhubung tidak menimbulkan rasa aman bagi pihak kreditur, karena kreditur tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada pada saat sekarang dan yang akan ada di kemudian hari. Demikian pula apabila ada lebih dari satu kreditur, tidak diketahui juga hak masing-masing kreditur kreditur tersebut. Oleh karena itu, maka kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tertentu.

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus antara kreditur dan debitur. Jadi merupakan jaminan hutang yang bersifat kontraktual, yaitu terbit dari perjanjian tertentu, jadi tidak timbul dengan sendirinya. Jaminan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

Penggolongan atas benda sebagai objek jaminan menurut sistem Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah atas benda bergerak dan tidak bergerak, dengan kriteria sebagai berikut :

b. Jaminan benda tidak bergerak terdiri dari :

- 1) Tanah, dengan atau tanpa bangunan atau tanpa tanaman di atasnya;
- 2) Mesin dan peralatan yang melekat pada tanah atau bangunan dan merupakan satu kesatuan;

- 3) Kapal laut dengan ukuran 20 meter kubik keatas dan sudah didaftarkan;
- 4) Bangunan rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu didirikan (dalam hal tanahnya berstatus hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas Negara, juga benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut).

c. Jaminan benda bergerak terdiri dari :

- 1) Jaminan benda bertubuh, yaitu jaminan yang secara fisik terlihat bendanya, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan kantor, barang perhiasan dan sebagainya.
- 2) Jaminan tak bertubuh, yaitu jaminan yang berupa surat-surat berharga, seperti surat wesel, *promes*, deposito berjangka, sertifikat deposito, piutang dagang, surat saham, *obligasi* dan *sekuritas* lainnya.

Pengikatan terhadap jaminan benda bergerak dapat dilakukan secara gadai atau fidusia. Benda bergerak yang akan digadaikan harus dikuasai oleh pihak kreditur, sedangkan pada pengikatan secara fidusia fisik dan benda bergerak tersebut tetap dikuasai oleh debitur, hanya hak kepemilikannya saja diserahkan kepada kreditur.

Muhamad Djumhana²⁹, mengemukakan bahwa masalah jaminan tetap *ideal* karena jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu memberikan hak dan kekuasaan

²⁹ Muhammad Djumhana ; *Hukum Perbankan Di Indonesia* ; Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.233-234.

kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Menurut R. Subekti³⁰, bahwa : “Jaminan yang *ideal* adalah jaminan : Kesatu, yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan ; Kedua, tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan usahanya); dan Ketiga, memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam artian bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima kredit.”

2. Pengertian Jaminan Fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia³¹ yaitu, “*fidusia cum creditore*” yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan

³⁰ *Opcit*, hlm.91.

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani ; *Jaminan Fidusia* ; Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm.119.

bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya sudah dibayar lunas dan “*fidusia cum amico*”. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut “*pactum fiduciae*”, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau “*in iure cessio*”.

Pengertian fidusia menurut Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut

dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Bentuk pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis.³²

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : *“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pendakuan (pemilikan), karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan ini.”*

Pasal 62 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa : *“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.”*

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) jika didasarkan dalam Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF) maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima

³² *Ibid*, hlm.128.

fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

3. Subyek Jaminan Fidusia.

Subyek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian / akta jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau *korporasi* pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. *Korporasi* adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Adapun untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. *Korporasi* disini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki usaha di bidang pinjam meminjam uang seperti perbankan.

Jadi penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan hutang yang diambil dari nilai obyek jaminan fidusia dengan cara menjual sendiri oleh kreditur atau melalui pelelangan umum.

4. Obyek Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah ditentukan batas ruang lingkup untuk fidusia yaitu berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia yang dipertegas dengan rumusan dalam pasal 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar,
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) meter kubik (M3),
- c. Hipotik atas pesawat terbang, dan
- d. Gadai.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia maka yang menjadi obyek dari fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan³³.

Untuk memberikan kepastian hukum maka Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani fidusia harus didaftarkan di Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

³³ *Ibid*, hlm.134.

yang sekarang dikenal dengan nama Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 12 sub 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000), dengan memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran fidusia akan tetapi harus melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pendaftaran fidusia. Tanggal jaminan fidusia Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

5. Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dicantumkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah-irah inilah yang memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia oleh karena itu dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melalui *parate eksekusi*. *Parate eksekusi* adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan. *Parate eksekusi* dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur pemegang hipotik pertama dan kepada pemegang gadai (*pand*).

Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam *parate eksekusi*. Diantaranya *parate eksekusi* pemegang hipotik pertama, *parate eksekusi* pemegang hak tanggungan pertama, *parate eksekusi* pemegang gadai, *parate eksekusi* pemegang fidusia, *parate eksekusi* Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk bank pemerintah.

6. Eksekusi Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui lembaga *parate eksekusi*. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia karena dalam gadai pun dikenal lembaga serupa³⁴.

Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdato menentukan bahwa : *“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berpiutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika telah tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”*

Untuk jaminan dalam bentuk hipotik, kemudahan eksekusi itu diberikan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdato yang menentukan : *“Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik , dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211.”*

³⁴ *Ibid*, hlm.150.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a) Pelaksanaan *title eksekutorial* oleh penerima fidusia ;
- b) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum , karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Namun khusus untuk *point c*, pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar modal atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundangan-perundangan di bidang pasar modal akan otomatis berlaku.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa penagihan dengan cara *constitutum prossesorium* adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33

Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi (cedera janji), adalah batal demi hukum.

Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya hutang yang dijamin. Sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar.

D. Kredit Bermasalah

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam penciptaan asset. Pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan bunga kredit yang disalurkan. Dalam kaitan ini maka risiko atas penciptaan asset dan pendapatan bunga merupakan risiko terbesar dalam kegiatan perbankan. Atas dasar itulah maka bank berusaha keras agar kredit yang diberikan kepada debitur dapat di-minimalisir risikonya untuk menjamin produktivitas asset, terjamin pengembaliannya (collectable), dan diperoleh hasil (return) yang maksimal dalam bentuk bunga kredit.

Faktanya, tidak semua kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sebagian kredit yang diberikan kepada para debitur mengalami kendala dan masalah dalam pengembaliannya sehingga dikategorikan sebagai kredit yang tidak produktif (Non Performing Loan –

NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit macet.

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 7 / 3 / DPNP / Tanggal 31 Januari 2005 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit, apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit tidak bermasalah (*performing loan*) atau kredit bermasalah (*non performing loan*). Kualitas dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Lancar.
2. Dalam perhatian khusus.
3. Kurang lancar.
4. Diragukan.
5. Macet.

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Secara teknis suatu kredit akan digolongkan macet berdasarkan peraturan tersebut di atas adalah apabila si debitur tidak lagi sanggup membayar bunga sampai beberapa bulan dan angsuran pokok sampai jauh melampaui jangka waktu yang diperjanjikan. Untuk menentukan suatu kualitas kredit dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu :

1. Prospek usaha.
2. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.
3. Kemampuan membayar.

Terdapat dua strategi dalam penyelesaian kredit bermasalah (non performing loan), yaitu :

1. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan meringankan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 7 / 3 / DPNP / tanggal 31 januari 2005, antara lain :

a) Penurunan suku bunga kredit.

Penurunan suku bunga kredit memiliki tujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.

b) Pengurangan tunggakan bunga kredit.

Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur / bank.

c) Pengurangan tunggakan pokok kredit.

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang maksimal diberikan oleh bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengurangan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi pihak bank.

d) Perpanjangan jangka waktu kredit.

Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi *performing loan* (tidak bermasalah) dan dengan perpanjangan waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.

e) Penambahan Fasilitas Kredit.

Penambahan kredit diharapkan agar usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang, yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan fasilitas kredit ini harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan hutang baru.

f) Pengambil-alihan agunan / asset debitur.

Pengambil-alihan asset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau perjumpaan hutang. Untuk meyelamatkan kredit dengan cara ini, maka bank / kreditur mengambil-alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil. Dengan demikian, agunan kredit menjadi milik pihak bank dan hutang debitur dinyatakan lunas. Pengambil-alihan asset debitur ini juga dapat disebut *set-off*.

g) Novasi (Pembaharuan Hutang).

Novasi dimanfaatkan untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengalihkan debitur lama kepada debitur baru berikut asset yang menjadi jaminan kredit yang disebut dengan novasi subyektif pasif atau mengalihkan kreditur kepada kreditur baru, yang disebut dengan novasi subyekti aktif atau mengubah isi atau obyek perjanjian sedangkan posisi kreditur dan debitur tidak berubah, yang disebut novasi obyektif. Novasi diatur dalam Pasal 1423-1424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Penyelesaian Kredit Macet

Penyelesaian kredit macet dilakukan dengan strategi pemutusan hubungan antara bank dan debitur, hal ini dilakukan bank jika hasil penyelamatan kredit sudah tidak dapat dimungkinkan kembali, berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi. Penekanan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum lebih ditunjukkan pada eksekusi jaminan yang hasilnya untuk melunasi hutang debitur. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus diyakini memiliki kekuatan hukum dan marketable didukung dokumen yang lengkap. Penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini, yaitu lembaga pengadilan negeri, yaitu:

- a) Bank menggugat debitur karena telah wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati.
- b) Bank meminta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap jaminan debitur.
- c) Pengadilan mengeluarkan penetapan lelang terhadap jaminan debitur macet tersebut diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang Negara (KP2LN). Diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445 / KMK.01 / 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), yang kantor pelayanannya disebut kantor Pelayanan Piutang dan Lelang negara (KP2LN).

BAB III

METODE PENELITIAN

D. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai Eksekusi Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Pemilikan Mobil Di Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang Di Kabupaten Pemalang ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang lebih mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, demi menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis normatif, artinya fakta-fakta di lapangan dikaitkan dengan asas-asas hukum, sistem hukum dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur cara penyelesaian kredit macet melalui eksekusi di bawah tangan.

Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fakta-fakta di lapangan dengan analisis yuridis normatif sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna dan kaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai Eksekusi Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Pemilikan

Mobil Di Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang Di Kabupaten Pemalang.

E. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

a. Data Penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang berupa bahan-bahan kepustakaan umum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data ini berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pelaksanaan penyaluran Kredit Pemilikan Mobil (KPM) beserta pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap kredit yang macet pada Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang di Kabupaten Pemalang.

b. Bahan Penelitian

Bahan penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari 2 (dua) bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- e) Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7 / 3 / DPNP / 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- f) Aturan-aturan atau kebijakan internal Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang di Kabupaten Pemalang tentang pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM).
- g) Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang di Kabupaten Pemalang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang membahas tentang Hukum Perikatan.
- b) Buku-buku yang membahas tentang Hukum Perjanjian.
- c) Buku-buku yang membahas tentang Jaminan.
- d) Buku-buku yang membahas tentang Fidusia.
- e) Buku-buku yang membahas tentang Pemberian Kredit Bank.

- f) Artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah perbankan.

c. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam teknik penelitian kepustakaan ini dikumpulkan melalui studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama dengan mempelajari aturan-aturan di bidang hukum yang menjadi obyek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis guna mempermudah dalam meng-analisanya.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah kegiatan yang dilakukan melalui penelitian langsung pada obyek penelitian berdasarkan data primer, yaitu :

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Danamom Cabang Pemalang yang berada di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Pemalang merupakan wilayah diantara strategis dimana terletak diantara dua kota besar di wilayah jalur pantai utara (Pantura) dengan kegiatan perbankan di sektor pemberian kredit konsumtif yang berkembang pesat, dan tentunya membawa implikasi yuridis yang beragam.

b. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang. Penentuan unit penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan penelitian pendahuluan (Pra-Riset) ditemukan bahwa dari 5 Bank Umum Nasional maupun Bank Umum Swasta Nasional yang berada di Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang tersebut cukup agresif dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Mobil, dan juga melakukan eksekusi di bawah tangan terhadap nasabah Kredit Pemilikan Mobil yang macet.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam tesis ini adalah eksekusi yang dilakukan di bawah tangan terhadap barang jaminan fidusia berbentuk agunan kredit kepemilikan mobil.

d. Responden

- a) Legal Officer PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang.
- b) Credit Officer PT. Bank Danamon Indonesia cabang Pemalang.
- c) Tiga (3) nasabah debitur Kredit Pemilikan Mobil (KPM) PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang.

e. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

2) Wawancara

Untuk melengkapi data di atas maka dilakukan pengumpulan data langsung dari responden, yaitu pihak bank yang diwakili oleh pejabat bank yang dianggap memiliki kompetensi dan representatif

mewakili bank tersebut dan juga dari pihak debitur yang kreditnya dianggap telah macet oleh bank dan jaminan fidusia-nya dieksekusi di bawah tangan oleh bank tersebut.

3) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara diberikan kepada responden selaku pihak bank dan pihak debitur KPM (Kredit Pemilikan Mobil), melalui daftar pertanyaan terstruktur dan disusun berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, agar diperoleh pendapat yang lebih mendalam tentang permasalahan yang akan penulis teliti.

F. Analisa Data

Setelah mendapatkan data dari penelitian yang dilakukan, baik data primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu menjelaskan masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Hasil Penelitian

1. Tahap Pemberian Pinjaman Kredit Pemilikan Mobil (KPM) di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang.

Hasil penelitian penulis di Bank Danamon Cabang Pemalang berkaitan dengan proses pemberian kredit, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :³⁵

- a) Nasabah (calon debitur) mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) kepada Bank Danamon dengan dilampiri syarat-syarat :
- ❖ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik suami ataupun istri,
 - ❖ Fotocopy Surat Nikah antara suami dan istri,
 - ❖ Fotocopy Kartu Keluarga,
 - ❖ Fotocopy Rekening Listrik,
 - ❖ Slip Gaji,

³⁵ Setyono, *Wawancara*, Bagian *Credit Officer* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang, tanggal 17 Mei 2007.

- ❖ SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
- ❖ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama terakhir dalam BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan bermotor),
- ❖ Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Bilamana seluruh persyaratan yang telah dipenuhi oleh calon nasabah, maka akan dilakukan proses pendaftaran kredit oleh bagian Administrasi Kredit (ADK). Selanjutnya permohonan kredit tersebut diserahkan kepada bagian *Credit-Officer* (CO) yang akan menindak lanjuti permohonan tersebut.

- b) Bagian *Credit Officer* (CO) dalam hal ini akan melakukan penelitian lapangan perihal berbagai macam yang berkaitan dengan proses pemberian kredit kepada calon nasabah tersebut, seperti halnya : bentuk usaha, bentuk jaminan dan perilaku nasabah (*attitudes*). Sehingga dengan dilakukannya langkah tersebut, maka hasilnya menjadi *output* terhadap penilaian calon nasabah, apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan suatu fasilitas kredit ataukah kurang layak untuk diberikan fasilitas kredit. Apabila dari hasil penilaian tersebut calon nasabah adalah layak untuk diberikan fasilitas kredit, maka perihal langkah yang dibutuhkan oleh bank selanjutnya adalah :

- ❖ Analisis Kualitatif, meliputi :

⇒ Analisa Watak

Adalah memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran karakter terhadap calon nasabah yang dikaitkan dengan kemauan untuk membayar hutangnya kelak. Untuk melakukan analisa ini harus

didukung dengan beberapa hal, yakni : Sepak Terjang Bisnis, Catatan Kriminal, Riwayat Hidup dan Riwayat pernikahan, Gaya Hidup, Tingkat Kooperatif selama proses analisa dilakukan, Legalitas usaha Pemohon bila dimiliki oleh pemohon.

⇒ Analisa Kemampuan

Adalah memiliki tujuan untuk mengukur tingkat potensial dari nasabah dalam membayar kreditnya.

⇒ Analisa Manajemen

Adalah kajian yang dilakukan oleh bank untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan dari nasabah dalam mengelola bisnisnya.

⇒ Analisa Kapital

Adalah bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap potensial usaha dari nasabah dalam mendukung pembiayaan dengan kapitalnya sendiri. Semakin besar kapital yang dimiliki oleh nasabah, hal ini memiliki perbandingan lurus terhadap besarnya porsi pembiayaan yang didukung oleh kapital sendiri ataupun sebaliknya.

⇒ Analisa Agunan

Adalah penilain yang dilakukan oleh bank terhadap nilai jaminan yang dimiliki oleh nasabah terhadap kepastiannya nasabah tersebut membayar kreditnya.

❖ Analisa Kuantitatif

Adalah penilaian yang dilakukan terhadap harta kekayaan atau kondisi keuangan nasabah (calon debitur), hutang piutangnya dan juga meliputi perolehan penjualan yang digambarkan dalam bentuk :

⇒ Neraca,

⇒ Rugi / Laba,

⇒ Rasio-rasio keuangan.

Bagian *Credit Officer* (CO) dalam menganalisa obyek yang dijadikan jaminan kredit termasuk juga didalamnya untuk melakukan *appresial* (taksiran) terhadap nilai jaminan. Adapun hal-hal yang patut dilakukan dalam menilai jaminan tersebut, adalah mengacu kepada tahun pembuatan dari mobil yang akan dibeli dengan fasilitas kredit bank, jenis mobil dan kondisi mobil, serta nilai penyusutan yang akan terjadi selama proses kredit berlangsung.

- c) Apabila seluruh substansi yang dibutuhkan untuk melakukan analisa telah dilakukan oleh bagian *Credit Officer* (CO), lalu langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kredit yang dibutuhkan oleh calon nasabah dimana jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah tersebut.
- d) Bagian *Credit Officer* (CO) akan melakukan negosiasi dengan calon nasabah mengenai jumlah kredit yang nantinya akan diberikan oleh bank, suku bunga kredit, jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh para pihak untuk melaksanakan pelunasan terhadap kredit tersebut.

e) Bilamana telah dicapainya kata sepakat, maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan *The Offering Letter* (Surat Penawaran) yang diberikan dari bank kepada nasabah. Surat ini merupakan pemberitahuan dari pihak bank kepada pemohon kredit bahwa permohonan kreditnya berupa (KPM / Kredit Pemilikan Mobil) telah disetujui. Isi dari surat penawaran (*the offering letter*) tersebut adalah sebagai berikut :

- ☒ Jumlah plafond kredit.
- ☒ Jangka waktu kredit.
- ☒ Suku bunga kredit.
- ☒ Provisi.
- ☒ Biaya administrasi.
- ☒ Biaya Notaris.
- ☒ Jaminan.
- ☒ Asuransi.
- ☒ Biaya pengikatan.
- ☒ Jumlah angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan.
- ☒ Tempo waktu angsuran (angsuran per bulan atau per minggu).

Bagian *Credit Officer* (CO) lalu akan merekomendasikan *The Offering Letter* tersebut kepada petugas bagian Administrasi Kredit (ADK) yang kemudian akan dilanjutkan kepada Pimpinan Cabang untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan *Sepervisor* ADK. Bilamana pemohon kredit menyetujui terhadap kondisi, persyaratan dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Surat Penawaran Kredit (*The*

Offering Letter), maka kepada pemohon diminta untuk menandatangani surat tersebut di atas materai yang cukup, sebagai bukti tanda persetujuannya, dimana suami/istri dari pemohon juga turut menandatangani surat persetujuan tersebut. Menurut responden³⁶, dalam surat penawaran kredit tersebut juga ditetapkan masa berlakunya antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari. Hal ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mempelajari isi surat penawaran tersebut. Bagi Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang jangka waktu ini dianggap cukup bagi pemohon untuk mempelajari dan mempertimbangkan isi surat persetujuan dan akibat hukum yang timbul jika menandatangani surat tersebut. Jika melebihi jangka waktu tersebut pemohon kredit tidak memberikan tanda persetujuan maka surat penawaran kredit tersebut dapat ditarik / dibatalkan oleh bank.

- f) Pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit antara bank kepada nasabah, yang dilakukan dihadapan Notaris disertai dengan pengikatan jaminan fidusia oleh Notaris yang biasa disebut dengan akta jaminan fidusia. Bilamana pemohon kredit menyetujui (yang dibuktikan dengan ditandatanganinya surat penawaran tersebut oleh pemohon kredit), maka selanjutnya dilakukan pengikatan antara pihak bank dengan pemohon berupa pengikatan perjanjian kredit. Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang menetapkan 2 (dua) bentuk akta yang harus ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu :

³⁶ Setyono, *Wawancara*, Bagian *Credit Officer* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang tanggal 17 Mei 2007.

☒ Akta Perjanjian Kredit.

Bentuk dan isi perjanjian kredit telah di-*standarisasi* (perjanjian kredit *standard*), sehingga tidak ada kesempatan dan peluang yang diberikan kepada pemohon kredit untuk melakukan peninjauan atau perubahan terhadap isi perjanjian kredit. Pada dasarnya bagian pokok-pokok penting yang tertera dalam surat penawaran kredit akan dituangkan kembali dalam perjanjian kredit. Mengenai hal ini dijelaskan oleh nara sumber³⁷, bahwa *standarisasi* perjanjian kredit dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan kepada nasabah. Apa yang telah dicantumkan dalam perjanjian kredit telah mewakili kepentingan bank dan debitur secara seimbang baik hak dan kewajiban dan tidak ada yang dirugikan. Bilamana debitur tidak setuju dengan isi dari perjanjian kredit maka debitur berhak untuk tidak menandatangani perjanjian kredit tersebut.

☒ Akta Jaminan Fidusia

Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang menerapkan pelaksanaan penandatanganan akta jaminan fidusia segera setelah penandatanganan akta perjanjian kredit dilakukan. Akta jaminan fidusia merupakan bentuk penjaminan atas kendaraan yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dengan maksud bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dijamin dengan kendaraan tersebut sebagai obyek jaminan

³⁷ Rudi Wicaksono, *Wawancara*, Bagian *Legal Officer* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang, tanggal 17 Mei 2007.

fidusia. Dengan penjaminan secara fidusia tersebut berarti pemilik kendaraan melakukan tindakan hukum pengalihan hak kepemilikan kepada bank selaku kreditur (selanjutnya disebut penerima fidusia) dan karena bank berhak atas obyek fidusia tersebut semata-mata dan selama kredit yang diterima debitur belum dilunasi. Dengan perkataan lain, selama debitur belum melunasi kewajiban kreditnya maka bank masih berhak atas kepemilikan obyek fidusia tersebut. Oleh karena penyerahan hak kepemilikan obyek fidusia tersebut tidak disertai dengan penyerahan fisik (*constitutum proressorium*) atau penguasaan fisik obyek fidusia masih tetap di bawah kekuasaan pemberi fidusia maka dengan demikian pemberi fidusia hanya berstatus sebagai peminjam pakai. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut : “Pembebanan jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia telah dilakukan ditempat dimana obyek jaminan fidusia berada dan telah menjadi miliknya penerima fidusia, sedangkan obyek jaminan fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan pemberi fidusia selaku peminjam pakai”.

- g) Atas dasar akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk notariil, maka bank melalui notaris rekanan yang telah ditunjuk oleh pihak bank akan melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) setempat di bawah Departemen Hukum dan HAM untuk mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia dan melengkapi

salinan akta yang telah dibuat secara notariil, berupa Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia. (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000). Walaupun Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut belum resmi dibuka di wilayah Jawa Tengah, namun untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Semarang. Sehingga segera setelah lahirnya Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia ini akan diserahkan kepada bank sebagai alat bukti yang kuat, bahwa telah terjadi hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya perihal adanya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

- h) Pencairan Kredit adalah bentuk pengucuran dana kredit yang dibutuhkan oleh nasabah setelah seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit tersebut telah dilengkapi oleh nasabah.

2. Alasan Penggunaan Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia Perihal Terjadinya Kredit Macet Pada Kredit Kepemilikan Mobil Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang.

Permasalahan kredit macet dari pinjaman kredit nasabah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan pasti terjadi pada tubuh setiap bank, walaupun telah dilakukan berbagai macam bentuk analisa oleh bagian kredit sebelum pinjaman kredit tersebut diberikan. Faktanya, tidak semua kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sebagian kredit yang diberikan kepada para nasabah mengalami kendala dan masalah dalam pengembaliannya sehingga dikategorikan sebagai kredit yang tidak produktif (*Non*

Performing Loan – NPL) atau bahkan kredit macet. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghapus adanya kredit macet.

Penyebabnya terjadinya kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) ini adalah dikarenakan nasabah telah tidak dapat membayar atau telah gagal dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan atau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam klausula-klausula perjanjian kredit.

Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang lebih cenderung untuk memilih bentuk eksekusi di bawah tangan. Hal ini cukup memiliki alasan karena disamping pertimbangan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan eksekusi tersebut adalah tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kedua bentuk eksekusi lainnya, dan juga pada eksekusi di bawah tangan memiliki tingkat efektifitas waktu tinggi (waktu yang dibutuhkan sangat singkat dan cepat).³⁸

3. Pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia Pada Kredit Pemilikan Mobil (KPM) Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang diketahui terdapat 10 Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang mengalami masalah (*Non-Performing Loan*) dan kredit macet dari 200 Perjanjian Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dengan jaminan Fidusia

³⁸ Rudi Wicaksono, *Wawancara*, Bagian *Legal Officer* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang, tanggal 17 Mei 2007.

selama periode 1 Tahun Pembukuan Perbankan dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.³⁹

Penyebabnya terjadinya kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) atau kredit macet ini adalah dikarenakan nasabah telah tidak dapat membayar atau telah gagal dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan atau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam klausula-klausula perjanjian kredit.

Pihak bank menyadari dan sekaligus mengakui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya gejala *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit macet adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut timbul tidak hanya dari kelemahan nasabah itu sendiri tetapi juga muncul dari kelemahan yang dimiliki oleh pihak bank sendiri, serta didukung pula oleh beberapa faktor eksternal, yakni faktor yang terjadi di luar pihak nasabah dan bank.

a) Kelemahan yang dimiliki oleh Nasabah ;

- ❖ permasalahan manajemen (*Managerial Problems*),
- ❖ permasalahan kecurangan dan/atau tidak keterbukaannya (*transparan*) dalam pemberian informasi calon nasabah kepada bank ketika melakukan analisa awal tersebut,
- ❖ adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

b) Kelemahan yang dimiliki oleh Bank ;

³⁹ Setyono, Wawancara, Bagian *Credit Officer* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang, tanggal 17 Mei 2007.

- ❖ adanya itikad yang tidak baik (*Non-Good Will Cooperating*) serta ketidak-mampuan dari pejabat atau pegawai bank dalam melakukan langkah awal sebelum pinjaman kredit tersebut dikucurkan kepada nasabah. Hal ini sering terjadi di komunitas bank swasta nasional maupun bank milik pemerintah, dikarenakan banyak terdapat oknum *bankers* nakal sehingga timbul permasalahan kredit fiktif yang berakibat pada jebolnya brankas bank,

- ❖ dan adanya kelemahan dalam proses pembinaan kredit.

c) Kelemahan Eksternal (Faktor *Non-Bank* dan *Non-Nasabah*)

- ❖ adanya perihal kejadian ***Force Majuer*** (keadaan di luar kekuasaan kehendak manusia) yang mengakibatkan barang jaminan rusak atau hilang,
- ❖ adanya perubahan-perubahan lingkungan eksternal.

Disamping beberapa faktor di atas yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang dialami nasabah kepada pihak bank, faktor lain pun dapat mempengaruhi timbulnya permasalahan kredit macet milik nasabah, yakni faktor yang disebabkan karena terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bank yang berkaitan dengan adanya pemberian kredit.

Pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan kredit macet adalah dengan secepat mungkin melakukan pendeteksian potensi timbulnya kredit bermasalah, sehingga semakin banyak pula peluang

untuk melakukan *alternative correction* bagi bank dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat dari pemberian kredit.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang, maka dapat diketahui posisi Bank terhadap nasabah khususnya bilamana dilihat dari usaha dan agunan yang diberikan oleh nasabah dalam perjanjian kreditnya.

Setelah melakukan analisa atas kemampuan nasabah dalam kewajibannya membayar pinjaman kredit kepada bank sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang menggunakan parameter *Do Daily Due* atau Kewajiban angsuran kredit yang harus dilakukan secara rutin oleh Nasabah kepada Bank, dapat-lah kita ketahui posisi kualitas nasabah tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel . I .
Klasifikasi Do Daily Due (3D)

Kategori	Grade	Keterlambatan pelunasan
Nasabah	A	0 Hari
Nasabah	B	1-15 Hari
Nasabah	C	15-30 Hari
Nasabah	D	dias 30 Hari

Sumber : data sekunder yang diolah

Dari klasifikasi yang telah ditentukan pihak bank terhadap nasabahnya tersebut, selanjutnya pihak bank dapat merencanakan tindakan yang akan dilakukan yaitu :

- a) Nasabah yang memiliki Grade A, adalah kualitas nasabah yang tidak perlu diragukan terhadap kemampuannya dalam melunasi pinjaman

kreditnya secara berkala bahkan bila perlu dilakukan restrukturisasi perjanjian kredit berupa penambahan jumlah *plafond* kredit.

- b) Nasabah yang memiliki Grade B, adalah nasabah yang mengalami kondisi keterlambatan dalam membayar pinjaman kreditnya dalam tenggang waktu 1-15 hari. Pada nasabah ini masih diberikan toleransi dalam keterlambatannya membayar pinjaman kreditnya.
- c) Nasabah yang memiliki Grade C, adalah nasabah yang mengalami kondisi keterlambatan dalam membayar pinjaman kreditnya dalam tenggang waktu 15-30 hari. Pada nasabah dianggap sebagai nasabah yang kurang baik dan akan diberikan pengertian agar supaya tidak mengalami keterlambatan di hari-hari berikutnya.
- d) Nasabah yang memiliki Grade D, adalah nasabah yang mengalami kondisi keterlambatan dalam membayar pinjaman kreditnya dalam tenggang waktu diatas 30 hari dilakukan langkah-langkah penyelamatan kredit karena nasabah tersebut memiliki kredit yang bersifat *Non-Performing Loan* (NPL).

Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 7 / 3 / DPNP / tanggal 31 Januari 2005 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit, apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit tidak bermasalah (*performing loan*) atau kredit yang bermasalah (*non performing loan*). Kualitas dapat digolongkan sebagai berikut :

- a) Lancar.
- b) Dalam perhatian khusus.

- c) Kurang lancar.
- d) Diragukan.
- e) Macet.

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan untuk pembagian butir (c) sampai dengan (e) adalah merupakan kredit yang memiliki permasalahan atau dapat dinilai sebagai kredit *non performing loan* (NPL) atau dengan kata lain bahwa kredit tersebut harus memiliki pengawasan *intensif* dari pihak bank yang telah memberikan kredit tersebut.. Untuk menentukan suatu kualitas kredit dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu :

- a) Prospek usaha.
- b) Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.
- c) Kemampuan membayar dari nasabah kredit.

Dari hasil penelitian ini, upaya penyelesaian kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* / NPL) dan kredit macet terhadap kredit kepemilikan mobil nasabah oleh Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang adalah dilakukannya upaya yang bersifat khusus serta fokus terhadap nasabah yang benar-benar telah tidak memiliki itikad baik dalam keinginan untuk membayar atau melunasi hutangnya secara berkala kepada bank sehingga pinjaman kredit tersebut tidak dapat direstrukturisasi oleh bank, hal ini adalah terhitung 3 (tiga) bulan atau 90 hari terhitung sejak nasabah tersebut diputuskan pertama kali oleh bank

bahwa nasabah tersebut telah terlambat melakukan prestasi pembayaran angsuran terhadap kreditnya.

Pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia pada Kredit Pemilikan Mobil (KPM) milik nasabah yang macet di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang adalah sejatinya merupakan pelaksanaan penyelesaian kredit macet secara musyawarah mufakat dan bersifat kekeluargaan antara nasabah tersebut dengan Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang.

Bila upaya musyawarah untuk mufakat atau upaya penyelesaian yang bersifat *preventif* seperti tersebut diatas telah dilakukan oleh bank dalam menanggulangi permasalahan NPL (kredit macet) tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan upaya yang lain guna terjaminnya pinjaman kredit yang telah diberikan kepada nasabahnya dapat kembali ke pihak bank.

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang akan menggunakan upaya penyelesaian kredit yang bersifat *represif*. Upaya-upaya *preventif* yang paling awal dilakukan ialah dengan melakukan upaya pemberian Surat Teguran kepada nasabah yang tidak *kooperatif* tersebut. Bila ternyata upaya pemberian Surat Teguran tersebut tidak dapat membawakan hasil, maka bank akan menempuh upaya *represif* berupa langkah penyitaan barang jaminan fidusia untuk dilakukan pelaksanaan eksekusi.

Pada tahap awal sebagai upaya *preventif* dari Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang, yakni dengan melayangkan surat teguran

kepada debitur kredit yang telah patut diduga dan dianggap oleh pihak bank telah lalai dengan terlambatnya atau tidak mengangsur kreditnya kepada bank berdasarkan perjanjian kredit dimana perjanjian kredit ini telah dibuat sebelumnya antara pihak debitur dengan pihak bank. Sehingga ketika peneguran itu dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah, maka tidak akan menimbulkan permasalahan penafsiran antara pihak bank dengan debitur.

Bank Danamon Cabang Pemalang ini mewajibkan pelunasan hutang nasabahnya secara berkala kepada pihak bank yakni dilakukan dengan mekanisme per-bulan ataupun per dua-mingguan. Jadi setiap bulan atau setiap 2 minggu terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit antara pihak bank dengan pihak debitur, maka debitur adalah harus melakukan kewajiban mengangsur (pelunasan hutang secara berkala) terhadap hutangnya tersebut. Apabila terjadi permasalahan terhadap nasabah seperti apa yang telah diungkapkan diatas, maka berdasarkan perjanjian kredit tersebut pihak bank memiliki hak untuk melayangkan surat teguran kepada nasabah tersebut.

Surat teguran lebih dikenal di kalangan Bank Danamon Cabang Pemalang adalah Surat Peringatan (SP) dilakukan dengan 3 tahap, yaitu Surat Peringatan tahap 1 (SP1), Surat Peringatan tahap 2 (SP2), dan Surat Peringatan tahap 3 (SP3).

Surat Peringatan Tahap 1 (SP1) akan dilayangkan sebagai peringatan bahwa nasabah telah mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman kreditnya secara berkala kepada bank terhitung

sejak 15-30 hari masa angsuran harus dibayarkan. Bila setelah dilakukan surat peringatan tersebut nasabah tetap tidak melakukan perihal kewajiban mengangsur pinjaman kreditnya kepada bank, maka akan diterbitkan Surat Peringatan tahap 2 (SP2).

Pada Surat Peringatan tahap 2 (SP2) ini, memiliki keterkaitan dengan Surat Peringatan yang mendahuluinya yaitu Surat Peringatan Tahap 1 (SP1). Surat Peringatan tahap 2 (SP2) ini dilayangkan ke alamat nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman kredit terhitung diatas 30 hari dari masa angsuran jatuh tempo. Pihak bank akan memberikan peringatan keras kepada nasabah bilamana dalam masa Surat Peringatan tahap 2 (SP2) ini, nasabah tidak mengindahkan apa yang tertera dalam substansi SP2 ini akan dilakukan penyitaan atau pengambil-alihan jaminan fidusia secara fisik oleh bank dari tangan nasabah. Barang jaminan tersebut diperuntukan untuk dilakukannya tindakan penjualan atau eksekusi guna terhadap melunasi hutang nasabah kepada bank.

Surat Peringatan tahap 3 (SP3), akan dilayangkan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran hutangnya terhitung sejak 90 hari dari masa jatuh tempo angsuran tersebut wajib dibayarkan. Surat Peringatan tahap 3 (SP3) ini merupakan bentuk somasi kepada nasabah untuk segera dilakukan atau dilunasinya pinjaman kredit sampai dengan batas waktu yang tertera dalam Surat Peringatan tahap 3 (SP3) ini. Sehingga bila Surat Peringatan tahap 3 ini tetap tidak dihormati oleh nasabah yang memiliki kredit pinjaman bermasalah, maka akan segera

dilakukan oleh pihak bank berupa upaya penyegelan atau penarikan barang jaminan fidusia secara fisik dari tangan nasabah oleh bagian kolektor untuk dilakukan penjualan guna melunasi pinjaman hutang nasabah tersebut. Adapun langkah penjualan barang jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh pihak bank dengan berdasarkan pada kekuatan adanya bukti hukum berupa surat kuasa untuk menjual, yang dibuat oleh pihak bank dengan pihak nasabah pada awal proses pemberian kredit tersebut dilakukan.

Setelah diterbitkannya Surat Peringatan tahap 3 (SP3) ini dan adanya substansi surat kuasa untuk menjual dari nasabah kepada pihak bank, maka pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap barang jaminan fidusia mendapatkan legitimasi secara hukum dan dapat dilaksanakan secara sah. Hal ini mengacu kepada bunyi klausula dalam akta fidusia yang dibuat dan ditandatangani sebelumnya antara pihak bank dengan nasabah peminjam kredit. Berdasarkan bunyi Pasal 5 ayat (2), menyatakan bahwa : “PENJAMIN (nasabah) setuju bahwa bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENJAMIN (nasabah) tanpa perantaraan Pengadilan dan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk langsung menjual Jaminan baik di bawah tangan maupun di muka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK termasuk bunga, denda, provisi dan biaya-biaya yang mungkin timbul berdasar Perjanjian Kredit termasuk segala biaya penjualan jaminan yang dimaksud di atas dan jika ada sisa penjualan,

maka sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada PENJAMIN (nasabah) tanpa adanya kewajiban dari BANK untuk membayar bunga, denda atas sisa penjualan tersebut. Sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang seluruh hutang DEBITUR (nasabah) kepada BANK, maka kekurangan (hutang) tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR (nasabah) kepada BANK dan wajib dibayar DEBITUR (nasabah) dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK”.

Dokumen lainnya yang diperuntukkan untuk menguatkan dalam pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap barang jaminan fidusia tersebut yakni dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang yang diterbitkan oleh bank untuk ditandatangani pihak nasabah. Setelah semua dokumen pendukung tersebut telah ditandatangani dan telah siap maka barang jaminan fidusia tersebut menurut pihan Bank Danamon Cabang Pemalang adalah layak untuk melakukan tindakan hukum berupa tindakan eksekusi di bawah tangan.

4. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan Terhadap Jaminan Fidusia pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) Yang Macet di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang.

Pelaksanaan eksekusi di bawah tangan adalah tidak selamanya seperti keinginan pihak bank. Pihak bank telah membuat sedemikian rupa tentang aturan main (*rule of games*) dalam klausula-klausula perjanjian kreditnya. Namun tidak sedikit dari aturan-aturan main tersebut justru

dilanggar oleh nasabah, khususnya pada proses pelaksanaan eksekusi di bawah tangan jaminan fidusia ini.

Permasalahan yang timbul dalam teknis pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia ini adalah diantaranya ada beberapa jumlah dari nasabah kredit macet yang terlambat atau lebih *ekstrem*-nya lagi dapat dikatakan bahwa nasabah justru tidak ingin untuk menyerahkan secara fisik barang jaminan kepada bank. Hal ini didukung dengan berbagai alasan yang datang dari nasabah kredit macet tersebut seperti halnya aturan main tersebut sangat memberatkan kewajiban nasabah peminjam kredit, baik dari bunga maupun pinjaman pokoknya sehingga jumlahnya besar untuk mengangsur atau periksa alasan lainnya yang berupa telah rusaknya barang jaminan sehingga perlu diperbaiki terlebih dahulu dan belum dapat diserahkan kepada pihak bank untuk dilakukan tindakan penjualan di bawah tangan. Dari berbagai macam bentuk alasan yang telah dikemukakan diatas bahkan ada pula nasabah peminjam kredit yang macet memiliki alasan yang sangat *extreme* yakni berupa dengan telah hilangnya barang jaminan pinjaman kredit. Sehingga hal ini sangat merugikan pihak bank.⁴⁰ Kerugian yang dialami pihak bank adalah berupa waktu dan biaya.

Bank sangat membutuhkan waktu yang telah terjadwal dalam proses pengembalian kredit yang telah diberikannya kepada nasabah (*returning value with the planfully*). Disamping waktu yang terjadwal tersebut, biaya yang harus dikeluarkan pihak bank menjadi membengkak,

⁴⁰ Aji Purwanto, Lina Ningsih, Wawan, *Wawancara*, Nasabah Peminjam Kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang, tanggal 18 Mei 2007.

dikarenakan dibutuhkannya pihak eksternal dari tubuh bank untuk melancarkan proses pelaksanaan pengambilan barang jaminan tersebut. Pihak eksternal ini seperti contohnya pihak yang berwajib (polisi).

Walaupun-toh pihak bank banyak mengalami kendala ataupun hambatan seperti tersebut diatas, pihak bank tetap dalam pengambilan barang jaminan tetap melakukan upaya musyawarah mufakat kepada nasabah kredit macet tersebut. Dengan memberikan berbagai macam bentuk pengertian terhadap dampak yang telah dilakukan oleh nasabah kredit macet itu yang dirasa sangat kurang dan tidak *cooperative* kepada pihak bank, serta memberikan pemahaman kepada nasabah tentang bagaimana sesungguhnya keuntungan yang dapat diperoleh nasabah kredit yang macet bila barang jaminannya dieksekusi dengan di bawah tangan (musyawarah mufakat) dan akan membawa dampak kerugian kepada nasabah bila barang jaminannya dieksekusi dalam bentuk lain, seperti penjualan di muka umum (pelelangan umum) melalui *title eksekutorial*. Maka dengan diberikannya sejumlah pengertian melalui bentuk musyawarah tersebut antara pihak bank dengan nasabah yang macet, maka sikap kooperatif tersebut akan muncul dari nasabah tersebut. Bentuk sikap kooperatif tersebut akan diwujudkan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah dalam rangka pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia tersebut.

Jadi dari berbagai macam bentuk pengalaman hambatan yang telah dialami oleh Bank Danamon Cabang Pemalang dalam proses pemberian

fasilitas kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia kepada nasabahnya, maka pilihan alternatif pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia perihal terjadi kredit macet dari pihak nasabahnya tersebut adalah dirasakan lebih sesuai dengan kebutuhan bank dan sangat

D. Pembahasan.

1. Alasan Penggunaan Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia Perihal Terjadinya Kredit Macet pada Kredit Kepemilikan Mobil di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang.

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam penciptaan *asset* bank. Pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan bunga kredit yang disalurkan. Dalam kaitan ini maka *risk* atau risiko atas penciptaan *asset* dan perolehan pendapatan bunga merupakan risiko terbesar dalam kegiatan perbankan. Atas dasar itulah maka bank berusaha keras agar kredit yang diberikan kepada debitur dapat di-*minimalisir* risikonya untuk menjamin produktivitas *asset*, terjamin pengembalian pinjaman kredit (*collectable*), dan diperoleh hasil (*return*) yang maksimal dalam bentuk bunga kredit.

Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang memberikan penilaian terhadap nasabah yang telah patut diduga dan/atau telah melakukan wanprestasi yakni bilamana nasabah tersebut telah melakukan dengan tidak tepat waktu dan/atau tidak melakukan sesuai dengan substansi yang tertera di dalam klausula-klausula perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya dengan bank. Sehingga dengan adanya permasalahan

wanprestasi yang dilakukan nasabah terhadap bank, maka nasabah telah dianggap gagal dalam membayar hutangnya atau kreditnya secara berkala kepada bank, dan bank pun memberikan penilaian bahwa kredit yang diberikan kepada debitur tersebut adalah telah memiliki masalah (*Non Performing Loan / NPL*) atau bahkan berubah menjadi kredit macet.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana dalam aturan ini telah memberikan alternatif pilihan eksekusi jaminan fidusia kepada penerima fidusia yakni diantaranya dengan menggunakan Titel Eksekutorial ; Parate Eksekusi ; dan juga Eksekusi di Bawah Tangan. Pelaksanaan eksekusi di Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang lebih cenderung untuk memilih bentuk eksekusi di bawah tangan. Hal ini cukup memiliki alasan karena disamping pertimbangan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan eksekusi tersebut adalah tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kedua bentuk eksekusi lainnya, dan juga pada eksekusi di bawah tangan memiliki tingkat efektifitas waktu tinggi (waktu yang dibutuhkan sangat singkat dan cepat).

Terkait dengan penggunaan eksekusi di bawah tangan terhadap barang jaminan fidusia, maka dalam akta jaminan fidusia tersebut telah diatur ketentuan mengenai hak bank selaku penerima fidusia untuk menjual obyek jaminan fidusia atas dasar titel eksekutorial, melalui pelelangan di muka umum dan/atau melalui penjualan di bawah tangan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 5 Akta Fidusia yang mengatur bahwa : “Dalam hal debitur lalai memenuhi kewajibannya

sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, kelalaian mana dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan maka penerima fidusia atas dasar kekuasaan yang dimilikinya berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial ; atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.” Atas dasar pasal ini maka dalam praktiknya bank diberikan kemudahan untuk melaksanakan eksekusi sendiri atas dasar kekuasaan yang dimilikinya.

Dari berbagai alternatif bentuk eksekusi yang diberikan oleh Undang-undang Jaminan Fidusia, langkah yang terakhirlah yang dianggap oleh Bank Danamon Cabang Pemalang sebagai langkah yang paling hemat biaya dan memiliki efisiensi waktu yang luar biasa signifikan. Hal ini dikarenakan tidak membutuhkan kewenangan dari lembaga *eksternal* bank, sehingga waktu dan biaya yang besar pun tidak terlibat di dalamnya. Hanya pihak bank dan nasabah serta calon pembeli (pihak ketiga) yang berminat untuk membeli barang jaminan tersebut. Apabila telah ditemukan persetujuan maka terjual-lah barang jaminan tersebut dan akan dikutip sebagian dari hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang kredit nasabah kepada bank. Lalu sisanya dapat diambil oleh nasabah. Hal ini merupakan langkah bersifat *win-win solutions* menurut pendapat dari Bank Danamon. Jadi sesungguhnya dengan diberikannya alternatif ruang terhadap pelaksanaan eksekusi di bawah tangan ini oleh undang-undang

akan sangat berdampak baik dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan bahwa pihak bank dapat melakukan penyelamatan dana kreditnya yang macet dengan prosedur yang singkat dan hemat waktu serta biaya.

2. Pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia pada Kredit Pemilikan Mobil (KPM) Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang.

Jumlah kredit yang telah dikucurkan oleh Bank Danamon Cabang Pemalang terbilang cukup besar, sehingga bagaimanapun kebutuhan terhadap bentuk pengelolaan atau *managerial* kredit harus benar-benar diperhatikan untuk mengurangi jumlah risiko timbulnya kredit macet.

Pada prinsipnya berdasarkan terminologi hukum perdata permasalahan kredit yang tidak memiliki *performa* bagus yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah adalah merupakan hubungan perdata belaka yakni hubungan hukum hutang-piutang antara pihak bank dengan nasabahnya. Seperti kita ketahui bahwa hubungan hukum tersebut adalah lahir berdasarkan dibuatnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah kredit dari bank tersebut. Nasabah akan memiliki kewajiban membayar pinjaman hutangnya kepada bank secara berkala berupa pinjaman pokok beserta bunga-bunganya berdasarkan klausula yang ada dalam perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya antara kedua belah pihak.

Dalam hal terjadi pinjaman kredit yang telah diberikan mengarah kepada gejala timbulnya kredit bermasalah (NPL) dan kredit macet, maka seharusnya pihak bank melakukan langkah penyelamatan kredit berupa

penanggulangan sedini mungkin atas pinjaman kredit bermasalah atau macet tersebut agar supaya dapat diatasi.

Penyelamatan Kredit adalah merupakan suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan meringankan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih *kooperatif* dan dari prospek pengembalian pinjaman kredit masih *feasible*. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan *kooperatif* dari nasabah serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian melalui restrukturisasi lebih banyak negoisasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Bank Sentral di Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia (BI) memberikan sejumlah fasilitas atau kebijakan tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah. Menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 7 / 3 / DPNP / tanggal 31 Januari 2005, fasilitas atau kebijakan tersebut, antara lain :

a) Penurunan suku bunga kredit.

Penurunan suku bunga kredit memiliki tujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya

bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.

b) Pengurangan tunggakan bunga kredit.

Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur / bank.

c) Pengurangan tunggakan pokok kredit.

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang maksimal diberikan oleh bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengurangan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi pihak bank.

d) Perpanjangan jangka waktu kredit.

Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi *performing loan* (tidak bermasalah) dan dengan perpanjangan waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.

e) Penambahan Fasilitas Kredit.

Penambahan kredit diharapkan agar usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang, yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan fasilitas kredit ini harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan hutang baru.

f) Pengambil-alihan agunan / asset debitur.

Pengambil-alihan asset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau perjumpaan hutang. Untuk meyelamatkan kredit dengan cara ini, maka bank / kreditur mengambil-alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil. Dengan demikian, agunan kredit menjadi milik pihak bank dan hutang debitur dinyatakan lunas. Pengambil-alihan asset debitur ini juga dapat disebut *set-off*.

g) Novasi (Pembaharuan Hutang).

Novasi dimanfaatkan untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengalihkan debitur lama kepada debitur baru berikut *asset* yang menjadi jaminan kredit yang disebut dengan *novasi subyektif pasif* atau mengalihkan kreditur kepada kreditur baru, yang disebut dengan *novasi subyektif aktif* atau mengubah isi atau obyek perjanjian sedangkan posisi kreditur dan debitur tidak berubah, yang

disebut novasi obyektif. Novasi diatur dalam Pasal 1423-1424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun bila langkah-langkah restrukturisasi pinjaman kredit tersebut tidak menemukan langkah solusi dalam penyelesaian kredit, maka langkah eksekusi dapat diambil oleh pihak bank. Langkah pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia di Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang pada praktiknya adalah sangat memperhatikan nilai-nilai kepentingan nasabah, walaupun sesungguhnya nasabah tersebut telah melakukan perihal yang sangat mengecewakan kepada pihak bank berupa terlambatnya atau tidak dibayarnya angsuran pinjaman kredit.

Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang dalam memberikan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia cenderung untuk memilih *instrument* jaminan dokumen-dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan mobil yang dibiayai oleh fasilitas pinjaman kredit kepemilikan mobil tersebut. Jadi penguasaan fisik dari mobil tersebut tetap di ada di tangan nasabah pinjaman kredit tersebut.

Dengan demikian pemberian jaminan berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan mobil oleh nasabah, hal ini pastinya tetap memberikan suatu keyakinan dan sekaligus sebagai jaminan kepastian kepada bank untuk mendapatkan pelunasan kredit yang telah diberikan kepada nasabahnya.

Jaminan-jaminan tersebut adalah wajib didaftarkan oleh penerima fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), pada saat penelitian ini

dibuat belum didirikan KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia) wilayah Jawa Tengah sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, pendaftaran dilakukan melalui Kantor Departemen Hukum dan Ham, ketentuan ini mengacu kepada bunyi dari Bagian Kedua Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Setelah jaminan tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kantor tersebut akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dimana tanggal lahirnya sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal pada saat permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut diajukan (Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia). Dan sertifikat jaminan fidusia ini, akan diberikan kepada penerima jaminan fidusia atau penerima kuasa dari penerima jaminan fidusia. Adapun substansi dari Sertifikat Jaminan Fidusia ini adalah berupa : identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia ; tanggal serta nomor akta Jaminan Fidusia ; nama serta tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia ; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ; uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ; nilai penjaminan ; dan nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hal ini berdasarkan bunyi Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia. Sertifikat ini sangat penting manfaatnya, yakni sebagai alat bukti oleh penerima fidusia bahwa telah ada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang telah dibuat antara pihak bank dengan nasabahnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia adalah memuat irah-irah “DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dengan demikian Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut adalah telah memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hal ini dapat dikatakan bahwa sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat dieksekusi langsung oleh bank bila nasabahnya wanprestasi. Sehingga dengan demikian Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang adalah telah memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap upayanya dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabahnya.

Berangkat dari bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, maka kita mengacu kepada pelaksanaan kongret dari eksekusi yang telah diberikan dalam undang-undang ini. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekusi, haruslah dapat dilakukan secara *mutatis mutandis* kepada tahapan eksekusi.

Eksekusi yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia memiliki beberapa alternatif, diantaranya berdasarkan Bab Kelima Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia, diantaranya :

- Pelaksanaan Titel Eksekutorial tersebut (berdasarkan irah-irah yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia tersebut).
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Lembaga Parate Eksekusi).

- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (eksekusi di bawah tangan).

Pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia di Bank Danamon Cabang Pemalang adalah dengan diterbitkannya atau dikirimnya Surat Peringatan (SP) kepada nasabah peminjam kredit yang macet adalah merupakan langkah sangat baik dalam memperhatikan kepentingan nasabah. Walaupun langkah tersebut tidak diatur dalam undang-undang Jaminan Fidusia, namun langkah tersebut mengacu kepada aturan-aturan *internal* yang telah dibuat pihak bank berdasarkan perjanjian kredit yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan pihak bank dengan memberitahukan kepada nasabah yang memiliki kredit macet untuk melakukan pelunasan pinjaman kredit secara berkala lagi kepada pihak bank adalah merupakan langkah *preventif* sebelum dilakukannya langkah *represif* berupa penyitaan barang jaminan dari pihak bank.

Penerbitan surat peringatan ini oleh pihak bank sama halnya dengan penerbitan surat somasi kepada kreditur yang macet ini sebelum upaya penyitaan barang jaminan kredit dilakukan. Dengan diberikannya surat peringatan menjadikan langkah selanjutnya dari pihak bank berupa penyitaan dan juga pelaksanaan eksekusi di bawah tangan memiliki legitimasi. Disamping juga langkah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan oleh nasabah kepada bank.

Penyelesaian kredit dengan melakukan eksekusi di bawah tangan terhadap barang jaminan fidusia merupakan langkah musyawarah mufakat, sehingga semua langkah tersebut dapat dikompromikan antara pihak bank dengan nasabah kredit sepanjang langkah tersebut mengarah kepada upaya untuk menyelamatkan kepentingan bank dalam menghadapi kredit macetnya.

Jadi dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya teknis *alternative* pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka hal ini sangat memberikan iklim yang sangat bagus dan sungguh *marketable* dalam dunia bisnis perbankan. Pihak bank sangat terbantuan dengan biaya sedikit serta waktu yang singkat, bank dapat menyelesaikan kreditnya yang bermasalah tanpa masalah.

3. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Bawah Tangan Terhadap Jaminan Fidusia di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan di Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar dan jumlahnya senantiasa meningkat. Salah satu sumber pendanaan yang sangat penting berasal dari lembaga perbankan yang kegiatannya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman kredit.

Pinjaman kredit perbankan ini disalurkan baik oleh bank-bank milik pemerintah maupun bank-bank swasta nasional guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat, pinjaman kredit

perbankan merupakan *instrument* yang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dan pendanaan berbagai kegiatan mereka.

Dalam setiap pemberian pinjaman kredit yang dilakukannya, bank mengharapkan pengembalian yang tepat waktu dan sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan bersama dengan nasabah. Namun pada saat-saat tertentu, dengan berbagai alasan, nasabah belum mampu atau lebih *ekstrem* nasabah justru tidak ingin mengembalikan hutang atau pinjamannya kepada pihak bank.

Pelaksanaan eksekusi di bawah tangan dapat mengalami penundaan waktu atau bahkan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Dikarenakan permasalahan atau hambatan yang timbul dari debitur. Walaupun sesungguhnya penggunaan eksekusi di bawah tangan merupakan penyelesaian damai yang sarat dengan falsafah musyawarah untuk mufakat terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, namun tidak selamanya upaya penyelesaiannya antara pihak bank dengan nasabah juga melulu dengan media musyawarah untuk mufakat. Terhadap debitur atau nasabah yang tidak atau dirasa kurang *kooperatif* atau nasabah nakal dapat dilakukan upaya hukum yang sepanjang langkah tersebut merupakan langkah guna melancarkan pelaksanaan eksekusi di bawah tangan dapat berjalan sesuai dengan jadwal waktunya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan solusi hukum dalam mendukung upaya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dengan penerbitan sanksi hukum yang tegas merupakan salah satunya upaya hukum yang mendukung

dilaksanakannya langkah eksekusi. Di dalam Bab VI tentang Ketentuan Pidana Pasal 35 Undang-undang Jaminan Fidusia berbunyi : “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Dan juga ketentuan di dalam Pasal 36 undang-undang yang sama juga menegaskan : “Bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”.

Jadi sesungguhnya dalam dunia bisnis perbankan khususnya dalam upaya bank memberikan pinjaman kredit kepada nasabahnya telah diberikan berbagai macam bentuk aturan hukum yang notabene sangat melindungi kepentingan perbankan itu sendiri. Sehingga untuk masa yang akan datang diharapkan permasalahan kredit macet ini dapat diminimalisir dengan hadirnya ketentuan-ketentuan hukum yang berpihak kepada terjaminnya kepentingan bank.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya pemberian Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) di Bank Danamon Cabang Pemalang adalah merupakan hubungan hukum perdata belaka, dimana hubungan tersebut merupakan hubungan hutang-piutang antara pihak bank dengan nasabahnya. Bank dalam proses pemberian kredit tetap melakukan *controlling* terhadap kredit yang telah diberikan kepada nasabahnya, sehingga diharapkan kredit tersebut dapat kembali kepada kas bank secara *optimal*. Bahwa dalam praktiknya proses penyelesaian permasalahan kredit dengan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia ini, bukan merupakan upaya penyelesaian penyelamatan kredit tanpa risiko, namun bagi pihak bank langkah ini sangat menghemat waktu sekaligus efisiensi biaya. Sehingga menurut pihak bank apapun risiko yang akan dihadapi, pihak bank cenderung untuk memilih langkah eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia sebagai upaya terakhir dalam proses penyelamatan kredit yang macet.
2. Pelaksanaan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang ini sangat memperhatikan sarana prosedur hukum yang ada serta sekaligus memperhatikan nilai-nilai kepentingan yang dimiliki oleh nasabah peminjam kredit. Penerbitan Surat

Peringatan tahap1-tahap3 dari pihak bank merupakan suatu langkah *maintaining* pinjaman kredit milik nasabah yang memiliki risiko macet. Penandatanganan surat kuasa menjual obyek jaminan kredit dan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan oleh nasabah kepada pihak bank juga merupakan suatu langkah hukum yang aman untuk dapat dilakukannya pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap barang jaminan fidusia.

3. Hambatan berupa terlambatnya penyerahan barang jaminan oleh nasabah kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang dalam pelaksanaan eksekusi di bawah tangan adalah suatu rintangan yang pasti dialami pula oleh bank-bank lainnya. Hambatan tersebut sangat merugikan pihak bank, baik dari aspek biaya yang harus dikeluarkan serta waktu yang dibutuhkan akan sangat besar. Padahal sesungguhnya *returning loan with time-plan fully* adalah suatu prinsip bank dalam melakukan usaha memberikan kredit kepada nasabahnya. Dengan diatasinya hambatan tersebut oleh pihak bank dengan berbagai macam musyawarah kepada nasabah serta didukung oleh dokumen-dokumen hukum yang telah dibuatnya maka pada praktiknya hambatan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak bank.

D. Saran

1. Dengan dipilihnya eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia telah merupakan pilihan hukum yang tepat bagi pihak bank, sehingga penyelesaiannya akan sangat menyingkat waktu dan biaya, walaupun terdapat berbagai macam kelemahan berupa hambatan yang harus dihadapi oleh pihak bank. Dibandingkan dengan dua bentuk eksekusi lain yang

disediakan oleh undang-undang jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi di bawah tangan merupakan pilihan hukum yang *smart* dari pihak bank.

2. Pelaksanaan eksekusi di bawah tangan jaminan fidusia di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemalang harus dapat disosialisasikan kepada nasabah peminjam kredit. Baik secara aspek prosedur, keuntungan dan juga tingkat efiektifitas serta tingkat efisiensinya. Sehingga para pihak dalam hal ini bank dengan nasabah peminjam kredit dapat memahaminya langkah pelaksanaan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia tersebut.
3. Hambatan harus di kompromikan dalam bentuk musyawarah mufakat antara nasabaha dengan pihak bank. Namun apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka seharusnya bank melakukan upaya-upaya tegas untuk melakukan penyelamatan kreditnya tersebut. Berkenaan dengan upaya tegas dalam penyelamatan kredit, eksekusi di bawah tangan merupakan salah satu bentuk penyelamatan kredit terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank. Bank Danamon Cabang Pemalang setidaknya meluncurkan inisiatif atau terobosan-terobosan baru dalam menghadapi risiko-risiko yang dihadapi oleh bank kepada nasabah dalam proses eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusia. Ataupun mengambil langkah-langkah tegas dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku kepada nasabah yang tidak kooperatif untuk menyelesaikan kreditnya. Sehingga risiko-risiko tersebut dapat dikurangi dan sekaligus dapat diselesaikan dengan mudah dalam melakukan eksekusi di bawah tangan terhadap jaminan fidusianya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikanto, Suharsini, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Renika Cipta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Asser, C., **Pedoman untuk Pengkajian Hukum Perdata**, Jilid III Hukum Perikatan, bagian I/Perikatan Terjemahan oleh Sulaiman Binol, Dian Rakyat Jakarta, 1991.
- Badrulzaman, Mariam Darus, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bintang, Sanusi, Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Djumhana Muhammad, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Hale, R.H., **Credit Analysis A Complete Guide**, Jhon Wiley and Sons, Inc, 1983.
- Henderson, J.W., dan Mannes, T.S., **The Financial Analysis Desk Book : A Cash Flow Approach To Liquidity**, Van Nostrand Reinhold, New York, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno., **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Edisi Keempat, Liberty Yogyakarta, 1997.
- Moeleong, L.J., **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Panggabean, Henry P, **Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian**, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Qirom, A.S.M., **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya**, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Satrio, J., **Hukum Jaminan – Hak-hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT.Internusa, Cetakan XIII, Jakarta, 1991.
- Supardi, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Seri 1, BPFE VII UGM, Yogyakarta, 1993.
- Setiawan, R., **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Seto, Bayu., **Beberapa Hal Tentang Itikad Baik Dan Tanggung Jawab**, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000.
- Soemitro, R.H., **Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Cetakan Kelima Jakarta, 1994.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, **Jaminan Fidusia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

Instruksi Presiden Nomor 15/IN/10/66 Tanggal 3 Oktober 1996 Tentang Pedoman
Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan

Instruksi Presiden Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 Tanggal 6 Februari 1967

Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/649/UPK/Pemb Tanggal 20
Oktober 1966

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 2/162/KEP/DIR

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB Tertanggal 31 Maret 1993
tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan
Bank bagi Bank Umum Swasta Nasional